

Peran Komunikasi Islam dalam Diplomasi Keamanan: Studi Kasus Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Palestina

Yulia Rimapradesi¹, I Kadek Andre Nuaba²

^{1,2}Universitas Sriwijaya

yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id¹, ikadekandrenuaba@fisip.unsri.ac.id²

Abstract

This study examines the role of Islamic communication in security diplomacy with a particular focus on efforts to protect Palestine. Islamic communication is understood not only as a religious instrument but also as a normative framework that fosters transnational solidarity among Muslims. Employing the concepts of Islamic Communication and Security Diplomacy and using a qualitative research method, the findings reveal that Islamic communication serves as a moral legitimacy that strengthens the diplomatic position of Muslim-majority states in international forums while simultaneously shaping global public opinion pressure. However, its effectiveness faces challenges such as political fragmentation within the Islamic world, negative framing by Western media, and structural constraints of the international system, particularly the dominance of the UN Security Council. Nevertheless, the study concludes that Islamic communication retains strategic potential to reinforce global solidarity for Palestine, especially if it is managed in an integrated manner through state diplomacy, international Islamic organizations, transnational media, and civil society movements.

Keywords: Islamic Communication, Security Diplomacy, Transnational Solidarity, Palestine, OIC.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan dengan fokus pada upaya perlindungan terhadap Palestina. Komunikasi Islam dipahami bukan hanya sebagai instrumen religius, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang membangun solidaritas transnasional umat Muslim. Menggunakan konsep Komunikasi Islam dan Diplomasi Keamanan, dengan metode penelitian kualitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Islam berfungsi sebagai legitimasi moral yang memperkuat posisi diplomatik negara-negara Muslim di forum internasional, sekaligus membentuk tekanan opini publik global. Namun, efektivitasnya masih dihadapkan pada tantangan berupa fragmentasi politik internal dunia Islam, framing negatif media Barat, serta keterbatasan struktural sistem internasional, khususnya dominasi Dewan Keamanan PBB. Meskipun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi Islam tetap memiliki potensi strategis dalam memperkuat solidaritas global terhadap Palestina, terutama jika dikelola secara terintegrasi melalui diplomasi negara, organisasi Islam internasional, media transnasional, dan gerakan masyarakat sipil.

Kata kunci: Komunikasi Islam, Diplomasi Keamanan, Solidaritas Transnasional, Palestina, OKI.

PENDAHULUAN

Sejak pertengahan September 2025 eskalasi ini memasuki babak baru ketika Israel melancarkan operasi darat besar-besaran ke Gaza City sembari mendesak warga sipil di bagian utara mengungsi ke selatan, bersamaan dengan penutupan Zikim Crossing yang memperparah krisis pangan dan bahan bakar di Gaza utara hingga PBB memperingatkan ancaman kelaparan (Al-Mughrabi, 2025; Reuters, 2025). Kementerian kesehatan Gaza melaporkan korban tewas telah mencapai puluhan ribu jiwa, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sementara rumah sakit turut menjadi sasaran serangan udara (Magdy, 2025). Situasi ini memicu kecaman keras dari Arab Saudi dan Qatar yang menyebutnya sebagai kelanjutan genosida, serta laporan Komisi Inkuiri PBB yang mengindikasikan kemungkinan pelanggaran hukum humaniter dan kejahatan perang (Reuters, 2025; Borger, 2025).

Di tengah eskalasi tersebut, negara-negara Muslim dan institusi internasional turut bergerak. Indonesia dan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut aksi segera komunitas internasional (Fathur Rochman, 2025), sementara OKI menekan Dewan Keamanan PBB agar mengeluarkan resolusi yang lebih tegas dalam menghentikan kekerasan dan menjamin bantuan kemanusiaan (Zamzami, 2023). Kepala HAM PBB, Volker Türk, bahkan menyebut situasi di Gaza dan Tepi Barat telah mencapai titik kritis akibat pengabaian hukum humaniter internasional (Donmez, 2025).

Peristiwa ini mempertegas bahwa konflik Palestina bukan sekadar masalah politik, melainkan juga tantangan global terkait keadilan, hukum humaniter, dan solidaritas kemanusiaan. Dalam konteks diplomasi, komunikasi Islam memiliki peran signifikan sebagai instrumen mobilisasi solidaritas umat, pembentukan opini publik internasional, dan pemberian legitimasi moral terhadap perjuangan Palestina. Komunikasi Islam, yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), solidaritas umat (*ukhuwwah islamiyah*), serta perdamaian (*as-salam*), dapat menjadi soft power bagi negara-negara Muslim maupun organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam memperjuangkan isu

Palestina (Nye, 2004). Misalnya, Indonesia secara konsisten menggunakan diplomasi berbasis nilai Islam dan kemanusiaan dalam forum PBB untuk menekankan pentingnya solusi dua negara dan perlindungan warga sipil Palestina (Kemlu, 2024).

Lebih lanjut, komunikasi Islam juga berperan dalam proses securitization, yaitu pembingkai konflik sebagai isu keamanan global yang mendesak. Melalui retorika moral dan religius, negara-negara Muslim seperti Qatar dan Turki mengangkat penderitaan warga Palestina ke dalam wacana internasional, sehingga memaksa aktor global untuk merespons tidak hanya sebagai masalah regional, melainkan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Peran media Islam internasional, seperti Al Jazeera, memperkuat narasi ini melalui penyebaran informasi yang menekankan penderitaan sipil dan pelanggaran hukum humaniter (Borger, 2025).

Namun, efektivitas komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan tidak lepas dari tantangan. Fragmentasi politik di dunia Islam sering melemahkan suara kolektif, sementara dominasi kekuatan besar di Dewan Keamanan PBB membatasi ruang gerak diplomasi negara-negara Muslim. Selain itu, framing negatif terhadap gerakan perlawanan Palestina kerap menggeser narasi dari isu kemanusiaan menjadi isu terorisme, yang pada akhirnya mereduksi pesan solidaritas Islam dalam percaturan diplomasi global (Keck & Sikkink, 1998).

Dengan demikian, penelitian ini memandang pentingnya mengeksplorasi bagaimana komunikasi Islam dijalankan oleh aktor negara (Indonesia, Qatar, Turki), organisasi internasional (OKI), serta media Islam dalam mendukung diplomasi keamanan untuk perlindungan terhadap Palestina, sekaligus hambatan apa saja yang membatasi efektivitasnya. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana komunikasi Islam bekerja sebagai instrumen solidaritas transnasional dan advokasi diplomatik bagi Palestina; kedua, bagaimana aktor non-negara, terutama media Islam dan organisasi seperti OKI, berperan dalam proses tersebut; dan ketiga, hambatan struktural maupun kultural apa yang membatasi

efektivitas komunikasi Islam sebagai instrumen diplomasi keamanan. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi kajian Hubungan Internasional, khususnya terkait soft power, konstruktivisme, dan peran agama dalam diplomasi kontemporer, sekaligus memperkaya kajian komunikasi Islam sebagai bidang yang tidak semata meminjam kerangka teori Barat (Solikhati & Fitri, 2026).

KAJIAN PUSTAKA

Jurnal *"Twitter and its elements: Analysis of the performance of Palestinian digital diplomacy on Twitter"* menelaah bagaimana aktor diplomasi Palestina memanfaatkan Twitter sebagai sarana diplomasi digital, khususnya dalam konteks konflik dan upaya meraih dukungan internasional. Penulis menggunakan analisis isi dan metrik kuantitatif untuk memeriksa akun-akun resmi Palestina, menilai frekuensi unggahan, pemakaian tagar seperti #FreePalestine dan #GazaUnderAttack, serta tingkat keterlibatan publik melalui retweet, like, dan komentar. Hasil kajian menunjukkan bahwa Twitter efektif menjadi kanal penyebaran narasi utama mulai dari penderitaan kemanusiaan hingga seruan solidaritas dan pembelaan hak asasi yang mampu meningkatkan visibilitas isu Palestina pada momen krisis. Namun, interaksi yang tercipta cenderung berupa retweet dan like daripada percakapan dua arah, sehingga pengaruhnya lebih banyak mengonsolidasikan pendukung yang sudah pro-Palestina ketimbang menjangkau audiens netral atau pembuat kebijakan asing. Penelitian ini merekomendasikan agar aktor diplomasi Palestina memperluas penggunaan bahasa selain Arab dan Inggris, memaksimalkan konten visual dan video, serta berkolaborasi dengan influencer dan media internasional agar pesan mereka dapat menembus khalayak global dan meningkatkan efektivitas diplomasi keamanan melalui media sosial (Abunahel, 2025).

Laporan *Clingendael* berjudul *"Religion and Islam in Contemporary International Relations"* menyoroti bahwa agama khususnya Islam kini menjadi faktor penting dalam politik global, bukan sekadar ranah privat. Agama berperan sebagai sumber legitimasi moral dan identitas politik, memengaruhi kebijakan luar negeri, diplomasi, serta proses perdamaian. Laporan ini menjelaskan bagaimana negara-negara

mayoritas Muslim maupun aktor non-negara (tokoh agama, ormas, jaringan transnasional) menggunakan nilai dan simbol keagamaan sebagai *soft power* untuk membangun dialog, mendorong kerja sama, dan meredakan konflik, sembari menekankan risiko sekuritisasi dan politisasi agama yang dapat memicu stereotip dan ekstremisme. Karena itu, laporan merekomendasikan agar pembuat kebijakan dan pelaku diplomasi mengintegrasikan dimensi religius ke dalam analisis dan strategi hubungan internasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi agama dan pencegahan penyalahgunaannya (Berger, 2010).

Studi Aziz dan Hidayatullah (2026) yang berjudul *"The Role of the Organization of Islamic Cooperation Multilateral Diplomacy in Realizing the 2023 Riyadh Summit Mandate for Gaza"* menelaah bagaimana Komite Menteri Arab-Islam OKI menjalankan mandat KTT Riyadh 2023 melalui kunjungan diplomatik ke lima negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun OKI berhasil menyatukan narasi, memperkuat norma kemanusiaan, dan menghasilkan tekanan politik melalui jalur multilateral, capaian tersebut tidak berhasil menghentikan konflik di Gaza karena OKI tetap terbentur mekanisme penegakan yang lemah serta kepentingan nasional negara-negara besar yang saling berbenturan.

Sementara itu, Ali, Alam, dan Shah (2025) dalam *"Assessing the OIC's Role in the Israel-Palestine Conflict: Challenges and Effectiveness"* menyimpulkan bahwa OKI secara konsisten memperjuangkan kepentingan Palestina, tetapi kapasitasnya untuk menghasilkan kemajuan diplomatik yang substantif tetap dibatasi oleh perselisihan internal antaranggota, kepentingan internasional yang saling bersaing, dan dinamika geopolitik yang terus berubah.

Berbeda dengan keempat kajian pembandingan di atas, penelitian ini menempatkan komunikasi Islam sebagai inti diplomasi keamanan dalam upaya perlindungan terhadap Palestina, bukan sekadar faktor pendukung. Studi *"Twitter and its elements..."* hanya meneliti kinerja diplomasi digital Palestina melalui Twitter dengan fokus pada metrik keterlibatan dan pemakaian tagar tanpa mengupas dimensi teologis, sedangkan

laporan Clingendael “Religion and Islam in Contemporary International Relations” menyoroti peran agama termasuk Islam dalam hubungan internasional secara makro dan konseptual tanpa mengulas khusus kasus Palestina. Adapun studi Aziz dan Hidayatullah (2026) serta Ali, Alam, dan Shah (2025) memang berfokus langsung pada peran OKI dalam konflik Israel-Palestina, tetapi keduanya menyoroti efektivitas diplomatik dan mekanisme kelembagaan OKI, bukan bagaimana nilai dan pesan keislaman dikomunikasikan sebagai instrumen legitimasi. Dengan demikian, kontribusi penelitian peran komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan khususnya pada Palestina terletak pada integrasi nilai, pesan, dan jaringan komunikasi Islam ke dalam praktik diplomasi keamanan yang langsung diarahkan sebagai instrumen solidaritas transnasional, sebagai sarana advokasi, peran aktor media dan juga negara, serta apa saja hambatan dalam upaya komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian “Peran Komunikasi Islam dalam Diplomasi Keamanan: Studi Kasus Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Palestina” adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus jamak (multiple case study), karena penelitian ini menekankan pemahaman makna dan konteks sosial-keagamaan daripada pengukuran angka. Merujuk pada Yin (2018), desain studi kasus jamak dipilih karena penelitian ini membandingkan bagaimana komunikasi Islam dijalankan oleh tiga aktor negara yang berbeda konteks politiknya, yaitu Indonesia, Qatar, dan Turki, di samping aktor non-negara berupa OKI dan media Islam internasional. Ketiga negara tersebut dipilih secara purposif karena masing-masing merepresentasikan pola keterlibatan yang berbeda dalam diplomasi Palestina: Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim non-Arab yang konsisten bersuara di forum multilateral, Qatar sebagai aktor Teluk dengan pengaruh media global melalui Al Jazeera, dan Turki sebagai negara yang memadukan kepentingan geopolitik regional dengan retorika keislaman. Menurut Lexy J. Moleong (2017) dalam Metodologi Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan “memahami

fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah” (Moleong, 2017). Sejalan dengan itu, Creswell (2014) dalam Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches menegaskan bahwa penelitian kualitatif mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap muncul dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014).

Data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen, bukan wawancara, mengingat fokus penelitian adalah narasi dan retorika komunikasi yang terekam dalam teks publik. Sumber data primer meliputi dokumen resmi diplomasi, seperti pernyataan Kementerian Luar Negeri dan deklarasi KTT OKI, sedangkan sumber data sekunder meliputi pemberitaan media Islam dan media arus utama internasional periode 2023–2025, serta literatur akademik tentang komunikasi Islam, diplomasi publik, dan hubungan internasional. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi tematik (thematic content analysis): peneliti mengidentifikasi unit analisis berupa pernyataan dan narasi yang memuat nilai-nilai keislaman dalam konteks diplomasi Palestina, mengelompokkannya ke dalam tema-tema (solidaritas transnasional, advokasi diplomatik, peran media, peran organisasi internasional, dan hambatan), lalu menginterpretasikannya dalam kerangka konsep komunikasi Islam dan diplomasi keamanan. Denzin dan Lincoln (2018) dalam The SAGE Handbook of Qualitative Research menekankan bahwa pendekatan semacam ini melihat dunia dalam perspektif interpretatif, berusaha menafsirkan fenomena berdasarkan makna yang diberikan manusia (Denzin, 2018).

Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen resmi, pemberitaan media, dan literatur akademik untuk tema yang sama guna memastikan konsistensi temuan. Perlu dicatat bahwa karena penelitian ini sepenuhnya berbasis studi pustaka dan dokumen tanpa wawancara dengan pelaku diplomasi, interpretasi yang dihasilkan bersifat berbasis-teks (text-based) dan terbuka untuk diperkaya oleh penelitian lanjutan

yang melibatkan data primer dari pelaku diplomasi secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Palestina telah menjadi pusat perhatian dunia internasional selama berdekade-dekade, tidak hanya karena faktor politik dan keamanan, tetapi juga karena dimensi kemanusiaan dan keadilan global. Dalam konteks ini, diplomasi keamanan tidak lagi cukup dijalankan hanya melalui instrumen kekuatan militer atau negosiasi politik formal, melainkan membutuhkan pendekatan komunikasi yang sarat nilai moral, etika, dan spiritual. Komunikasi Islam hadir sebagai fondasi yang memperkuat upaya diplomasi, dengan mengedepankan prinsip keadilan, solidaritas, dan ukhuwah antarumat manusia. Peran komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan terhadap perlindungan Palestina dapat dipahami melalui berbagai dimensi, diantaranya:

Komunikasi Islam sebagai Instrumen Solidaritas Transnasional

Komunikasi Islam bukan hanya sekadar medium penyampaian pesan bernuansa religius, melainkan juga instrumen yang menghubungkan umat Muslim lintas negara. Konsep ukhuwwah islamiyah (persaudaraan Islam) menjadi landasan normatif yang mendorong terbentuknya solidaritas kolektif. Solidaritas ini berfungsi sebagai “jaringan emosional dan spiritual” yang memobilisasi opini publik Muslim untuk mendukung perjuangan Palestina melawan ketidakadilan dan penindasan (Esposito, 2009).

Dalam penelitian ini, komunikasi Islam dibatasi secara operasional sebagai penyampaian pesan, narasi, dan simbol yang secara eksplisit merujuk pada nilai, prinsip, atau otoritas keislaman, seperti ayat, hadis, fatwa, dan retorika ukhuwwah, yang digunakan secara sengaja oleh aktor negara maupun non-negara untuk memengaruhi opini publik atau kebijakan luar negeri terkait Palestina. Batasan ini penting agar tidak semua tindakan yang dilakukan oleh aktor Muslim, misalnya bantuan kemanusiaan atau pernyataan diplomatik yang tidak mengandung rujukan keislaman eksplisit, otomatis dikategorikan sebagai komunikasi Islam (Solikhati & Fitri, 2026).

Dalam perspektif komunikasi politik internasional, seruan solidaritas terhadap Palestina oleh ulama, cendekiawan Muslim, organisasi Islam internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta media berbasis Islam, mampu membentuk narasi kolektif yang berpengaruh pada kebijakan luar negeri negara-negara Muslim. Dengan kata lain, komunikasi Islam bekerja sebagai “soft power” yang mendorong negara Muslim bergerak ke arah kebijakan pro-Palestina di forum multilateral maupun bilateral.

Salah satu wujud konkret peran komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan dapat dilihat melalui berbagai aksi nyata solidaritas terhadap Palestina. Dalam ranah diplomasi multilateral, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memainkan peran sentral. Sejak lama, isu Palestina menjadi agenda utama dalam setiap forum tingkat tinggi yang diselenggarakan (OIC, 2021). Selain diplomasi multilateral, gerakan ulama dan fatwa solidaritas juga berperan penting dalam memperkuat dukungan terhadap Palestina. Ulama dunia Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah mengeluarkan seruan dan fatwa mengenai pentingnya jihad diplomasi serta dukungan moral kepada rakyat Palestina (Junaidi, 2024). Seruan tersebut kemudian menjadi legitimasi religius yang mendorong opini publik Muslim untuk mengekspresikan solidaritas, baik dalam bentuk donasi, aksi kemanusiaan, maupun demonstrasi damai. Dengan demikian, komunikasi Islam berfungsi sebagai jembatan antara otoritas keagamaan dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan bagi Palestina.

Selanjutnya, mobilisasi media Islam dan platform digital juga menjadi instrumen yang tidak kalah strategis. Media berbasis Islam seperti *Al Jazeera* dan *Middle East Monitor* konsisten mengangkat narasi pro-Palestina, sehingga mampu memengaruhi opini publik internasional (Lawal, 2025). Di ruang digital, seruan solidaritas yang diwujudkan melalui tagar seperti **#PrayForPalestine** atau **#SavePalestine** telah berhasil menciptakan gelombang dukungan global yang menekan komunitas internasional untuk lebih responsif terhadap konflik tersebut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana komunikasi Islam dapat bertransformasi melalui teknologi digital

untuk memperluas jangkauan solidaritas transnasional (Jabr, 2024).

Tidak kalah penting adalah bantuan kemanusiaan dan program rekonstruksi yang dilakukan oleh sejumlah negara Muslim. Indonesia, Turki, dan Qatar, misalnya, secara konsisten mengirimkan bantuan medis, pangan, hingga dukungan finansial bagi pembangunan infrastruktur di Gaza (Rinaldi, 2025). Tindakan ini bukan hanya respons politik, tetapi juga manifestasi dari legitimasi moral yang bersumber dari nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, komunikasi Islam menegaskan kembali bahwa kepedulian terhadap Palestina merupakan bagian integral dari tanggung jawab kolektif umat Muslim.

Aksi solidaritas juga terlihat melalui diplomasi publik dan demonstrasi massa yang berlangsung di berbagai belahan dunia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Istanbul, dan London, umat Islam turun ke jalan untuk melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap agresi Israel. Demonstrasi ini tidak hanya menjadi saluran ekspresi solidaritas, tetapi juga memberikan tekanan politik terhadap pemerintah setempat agar mengambil sikap lebih tegas dalam mendukung Palestina. Dalam hal ini, komunikasi Islam berfungsi sebagai kekuatan transnasional yang mengonsolidasikan aspirasi publik ke arah gerakan politik global.

Dalam konteks diplomasi keamanan, komunikasi Islam menciptakan solidaritas kolektif yang mengurangi fragmentasi politik di dunia Muslim. Solidaritas ini memperkuat posisi tawar negara Muslim di forum internasional, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan keamanan yang berpihak pada Palestina.

Komunikasi Islam dalam Advokasi Diplomatik

Dalam konteks diplomasi keamanan, komunikasi Islam berfungsi sebagai legitimasi moral yang memperkuat posisi diplomatik negara-negara Muslim dalam memperjuangkan isu Palestina. Nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan (*al-'adl*), kemanusiaan (*al-insaniyyah*), dan solidaritas (*ukhuwwah islamiyyah*) menjadi kerangka normatif yang dijadikan dasar dalam advokasi politik luar negeri. Indonesia, misalnya, secara konsisten menggunakan narasi kemanusiaan berbasis nilai Islam di berbagai forum internasional, termasuk

di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui pendekatan diplomasi ini, Indonesia menegaskan penolakannya terhadap agresi Israel serta mengadvokasi penerapan solusi dua negara sebagai jalan damai yang berkeadilan bagi Palestina (Kemlu, 2024).

Lebih jauh, negara-negara lain seperti Qatar dan Turki juga memainkan peran penting dalam advokasi diplomatik melalui komunikasi Islam. Qatar, melalui jaringan media internasional seperti *Al Jazeera*, secara aktif membingkai penderitaan rakyat Palestina sebagai isu kemanusiaan global, sehingga mendapatkan simpati luas dari masyarakat internasional (El-Nawawy & Iskandar, 2002). Sementara itu, Turki memanfaatkan forum multilateral, termasuk Majelis Umum PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk menekan Israel serta memperkuat dukungan internasional terhadap Palestina (Aras, 2017). Strategi komunikasi ini memperluas isu Palestina dari sekadar konflik regional menjadi persoalan universal yang menyangkut keamanan manusia dan stabilitas global.

Dengan demikian, penderitaan rakyat Palestina tidak hanya dipandang sebagai masalah politik kawasan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap prinsip kemanusiaan, stabilitas global, dan keamanan internasional. Komunikasi Islam dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen normatif sekaligus strategis yang memberi legitimasi pada advokasi diplomatik dunia Muslim, sekaligus memperkuat basis moral dalam arena politik internasional.

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa sikap aktif Qatar dan Turki dalam isu Palestina tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh nilai keislaman semata. Qatar, misalnya, juga memiliki kepentingan strategis membangun citra sebagai mediator regional melalui investasi besar pada *Al Jazeera* dan diplomasi Teluk, sementara Turki memadukan retorika keislaman dengan ambisi kepemimpinan regional pasca-Ottoman serta persaingannya dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (Aras, 2017). Dengan kata lain, komunikasi Islam kemungkinan besar bekerja bersamaan dengan, bukan menggantikan, kalkulasi kepentingan nasional dan geopolitik, sehingga klaim bahwa nilai keislaman menjadi penggerak utama advokasi

diplomasi perlu dibaca sebagai salah satu faktor yang saling terkait, bukan penjelasan tunggal.

Media Islam sebagai Saluran Diplomasi Non-Negara

Selain negara, aktor non-negara juga memiliki kontribusi besar dalam membentuk opini publik dan memengaruhi agenda diplomasi global. Salah satu aktor penting adalah media Islam internasional, dengan *Al Jazeera* sebagai contoh utama. Sejak berdiri pada akhir 1990-an, *Al Jazeera* telah memainkan peran strategis dalam mengangkat isu Palestina ke panggung global. Melalui liputan yang menekankan penderitaan sipil, penghancuran infrastruktur, dan pelanggaran hukum humaniter oleh Israel, media ini berhasil menggeser wacana internasional. Isu Palestina yang sebelumnya sering dipinggirkan dalam kerangka “perang melawan terorisme” pasca-11 September 2001, dibingkai ulang sebagai persoalan keadilan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (El-Nawawy & Iskandar, 2002).

Peran ini dapat dipahami dalam kerangka *transnational advocacy networks* yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink (1998), di mana aktor non-negara seperti media, LSM, dan jaringan advokasi lintas negara mampu memengaruhi perilaku negara dengan menciptakan tekanan moral dan politik (Keck & Sikkink, 1998). Dalam kasus Palestina, media Islam berfungsi sebagai agen advokasi yang menyuarakan aspirasi rakyat Palestina ke audiens global. Dengan liputan yang luas dan konsisten, media tersebut mendorong lahirnya solidaritas internasional serta meningkatkan tekanan diplomasi terhadap negara-negara besar agar mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

Lebih jauh, media Islam juga berperan dalam agenda-setting diplomasi internasional. Dengan memberikan ruang besar pada narasi kemanusiaan, media seperti *Al Jazeera* dan *Middle East Monitor* menantang dominasi media arus utama Barat yang cenderung bias terhadap narasi keamanan Israel. Kehadiran media Islam dengan framing alternatif ini memungkinkan terbentuknya opini publik global yang lebih kritis terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya (Seib, 2008). Hal ini pada gilirannya memaksa para pengambil kebijakan untuk

memperhitungkan opini publik dalam merumuskan sikap diplomasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa **komunikasi Islam melalui media internasional** tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi non-negara yang mampu menggeser arah wacana global. Media Islam menempatkan isu Palestina sebagai problem moral yang menyentuh hati nurani dunia, sekaligus memperkuat legitimasi perjuangan rakyat Palestina di ranah diplomasi internasional (Lynch, 2006).

Perlu dicatat bahwa klaim mengenai framing *Al Jazeera* dan *Middle East Monitor* dalam kajian ini bersumber dari literatur sekunder, bukan dari analisis isi (content analysis) pemberitaan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Dengan demikian, kesimpulan tentang pengaruh media Islam terhadap opini publik global bersifat inferensial dan akan lebih kuat apabila diverifikasi melalui studi lanjutan yang menganalisis sampel pemberitaan secara langsung.

Peran Organisasi Internasional Berbasis Islam

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan salah satu aktor internasional berbasis agama terbesar di dunia yang secara konsisten menempatkan isu Palestina sebagai agenda prioritas. Dalam kerangka diplomasi keamanan, OKI tidak hanya sekadar mengeluarkan resolusi politik, tetapi juga membingkai perjuangan rakyat Palestina melalui narasi moral berbasis Islam. OKI menekankan bahwa Palestina bukan sekadar konflik teritorial, melainkan persoalan keadilan global dan kemanusiaan universal. Retorika ini bersumber dari prinsip-prinsip Islam, antara lain keadilan (*al-'adl*), persaudaraan umat (*ukhuwwah islamiyyah*), dan perlindungan terhadap kaum tertindas (*mustad'afin*) (Hashmi, 2009).

Sejak berdirinya pada tahun 1969, OKI telah menjadikan isu Palestina sebagai “cause célèbre” dunia Islam. Dalam berbagai KTT maupun sidang luar biasa, OKI menegaskan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk agresi Israel. Resolusi yang dikeluarkan tidak hanya menekankan aspek politik, tetapi juga mengandung pesan normatif bahwa membela Palestina adalah kewajiban moral kolektif umat

Islam (OIC, 2021). Melalui komunikasi Islam ini, OKI berupaya mengonsolidasikan negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah diplomatik di forum internasional, termasuk di PBB, guna memperkuat legitimasi perjuangan rakyat Palestina.

Namun demikian, efektivitas OKI dalam memperjuangkan isu Palestina seringkali menghadapi tantangan internal. Perbedaan kepentingan politik dan strategi diplomasi antarnegara anggota kerap melemahkan konsensus bersama. Misalnya, sebagian negara anggota memiliki hubungan diplomatik atau kerja sama ekonomi dengan Israel, yang menyebabkan komitmen kolektif OKI tidak selalu konsisten (Kayaoglu, 2015). Akibatnya, meskipun OKI mampu memproduksi narasi solidaritas berbasis Islam yang kuat, implementasi diplomasi konkret di tingkat global sering kali tidak mencapai hasil maksimal.

Meskipun terdapat keterbatasan, peran OKI tetap signifikan dalam membentuk komunikasi transnasional Islam. OKI berfungsi sebagai wadah koordinasi, kanal advokasi diplomatik, sekaligus simbol legitimasi moral umat Islam di panggung dunia. Dengan mengangkat Palestina sebagai isu kemanusiaan dan keadilan global, OKI memperkuat proses framing bahwa perjuangan Palestina adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi komunitas internasional secara lebih luas (Gerges, 2013).

Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun komunikasi Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen diplomasi keamanan, efektivitasnya tidak sepenuhnya bebas dari hambatan struktural maupun kultural. Pertama, **fragmentasi politik di dunia Islam** sering menjadi kendala utama. Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki kepentingan nasional yang berbeda, terutama terkait hubungan dengan kekuatan besar dan Israel. Misalnya, sebagian negara memilih normalisasi hubungan dengan Israel melalui *Abraham Accords*, sementara negara lain tetap konsisten menolak. Perbedaan ini melemahkan konsensus kolektif dan menjadikan diplomasi Islam kurang solid di tingkat global (Khader, 2013).

Kedua, tantangan serius juga muncul dari framing negatif oleh media Barat. Banyak media

arus utama di Eropa dan Amerika Serikat menggambarkan gerakan perlawanan Palestina seperti Hamas atau Jihad Islam sebagai organisasi teroris, sehingga mengaburkan aspek kemanusiaan dari konflik tersebut. Narasi ini memengaruhi opini publik internasional dan sering kali menggeser fokus dari pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel menuju isu keamanan global yang berpusat pada terorisme (Said, 1997). Akibatnya, pesan komunikasi Islam yang menekankan solidaritas, keadilan, dan perlindungan terhadap kaum tertindas menjadi kurang efektif dalam meraih dukungan luas.

Ketiga, keterbatasan struktural dalam sistem internasional, khususnya pada Dewan Keamanan PBB, semakin mempersempit ruang gerak diplomasi negara-negara Muslim. Struktur keanggotaan tetap dengan hak veto yang dimiliki Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok kerap dimanfaatkan untuk menghalangi resolusi yang mendukung Palestina. Amerika Serikat secara konsisten menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari sanksi internasional. Hal ini menjadikan narasi solidaritas yang dibangun melalui komunikasi Islam sulit terkonversi menjadi kebijakan internasional yang mengikat (Acharya, 2014).

Keempat, tantangan internal umat Islam sendiri juga tidak bisa diabaikan. Perbedaan mazhab, rivalitas geopolitik (misalnya antara Arab Saudi dan Iran), serta dinamika politik domestik di masing-masing negara sering kali lebih dominan dibandingkan agenda kolektif membela Palestina. Situasi ini memperlemah posisi tawar komunikasi Islam sebagai sarana diplomasi transnasional (Esposito, 2001).

Kelima, komunikasi Islam dalam diplomasi keamanan juga tidak lepas dari kritik dari dalam dunia Islam sendiri. Sejumlah kalangan menilai bahwa retorika keislaman kerap diinstrumentalisasi oleh elite politik untuk kepentingan legitimasi domestik, bukan semata solidaritas terhadap Palestina. Mamedov dan Jackson (2025) menunjukkan bahwa instrumentalisasi Islam sebagai alat soft power, sekalipun dilakukan oleh aktor non-Muslim seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat, berisiko menimbulkan tuduhan kemunafikan ketika narasi yang dipromosikan ke luar negeri berbenturan dengan praktik domestik. Logika

serupa berlaku bagi negara-negara Muslim: seruan “jihad diplomasi” atau fatwa solidaritas dapat dipertanyakan keotentikannya apabila tidak diikuti konsistensi kebijakan domestik, sehingga berpotensi mengurangi kredibilitas komunikasi Islam itu sendiri sebagai instrumen diplomasi.

Dengan demikian, meskipun komunikasi Islam memiliki kekuatan moral yang signifikan, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global, dominasi media internasional, dan fragmentasi internal dunia Islam. Hal ini menuntut strategi komunikasi yang lebih terintegrasi, berbasis jaringan transnasional, dan kolaborasi dengan aktor non-negara untuk memperkuat legitimasi diplomasi Islam di tingkat internasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Islam berperan penting sebagai instrumen diplomasi keamanan dalam memperjuangkan isu Palestina di tingkat global. Melalui nilai-nilai dasar seperti *ukhuwwah islamiyah*, keadilan (*al-'adl*), dan perlindungan terhadap kaum tertindas (*mustad'afin*), komunikasi Islam mampu menjadi legitimasi moral yang memperkuat posisi diplomatik negara-negara Muslim. Praktiknya tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari diplomasi multilateral melalui OKI, fatwa dan seruan ulama, liputan media Islam internasional, hingga mobilisasi solidaritas transnasional melalui aksi damai dan bantuan kemanusiaan.

Namun demikian, penelitian ini juga menegaskan adanya **tantangan serius** yang membatasi efektivitas komunikasi Islam, seperti fragmentasi politik internal di dunia Islam, framing negatif media Barat yang menggeser narasi ke arah isu terorisme, serta dominasi struktur internasional yang bias terhadap Israel, terutama melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB. Faktor-faktor tersebut seringkali melemahkan dampak diplomasi Islam di level global.

Meskipun begitu, komunikasi Islam tetap memiliki **potensi strategis** untuk memperkuat solidaritas global terhadap Palestina jika dikelola secara kolektif, konsisten, dan terintegrasi dengan diplomasi publik modern serta gerakan masyarakat sipil internasional. Dengan memadukan instrumen diplomasi negara,

organisasi internasional berbasis Islam, media transnasional, serta aksi-aksi kemanusiaan, komunikasi Islam berpeluang menjadi kekuatan moral yang mampu memengaruhi kebijakan internasional, sekaligus meneguhkan solidaritas dunia Islam dalam membela hak-hak rakyat Palestina.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca. Pertama, analisis sepenuhnya bersumber dari studi pustaka dan dokumen tanpa didukung wawancara dengan pelaku diplomasi, sehingga interpretasi atas motif di balik komunikasi Islam bersifat inferensial. Kedua, cakupan kasus dibatasi pada tiga negara (Indonesia, Qatar, Turki) dan satu organisasi internasional (OKI), sehingga temuan ini belum tentu berlaku untuk konteks negara Muslim lain seperti Malaysia, Pakistan, atau negara-negara Teluk lainnya. Ketiga, klaim mengenai pengaruh media Islam terhadap opini publik global belum diuji melalui analisis isi pemberitaan secara langsung. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan wawancara dengan pelaku diplomasi, memperluas cakupan kasus ke negara Muslim lain, serta menambahkan analisis isi media secara sistematis, agar klaim mengenai efektivitas komunikasi Islam sebagai instrumen diplomasi keamanan dapat diuji secara lebih ketat. Secara teoretis, temuan ini menegaskan perlunya kajian komunikasi Islam dikembangkan sebagai kerangka yang berdiri sejajar dengan, bukan sekadar pelengkap, teori soft power dan konstruktivisme dalam Hubungan Internasional (Solikhati & Fitri, 2026).

DAFTAR PUSTAKA

- Abunahel, M. M. (2025). Twitter and its elements: Analysis of the performance of Palestinian digital diplomacy on Twitter. *Sage Journal*, 197–218.
- Acharya, A. (2014). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ali, W., Alam, A., & Shah, G. M. (2025). Assessing the OIC's Role in the Israel-Palestine Conflict: Challenges and Effectiveness. *Social Science Review Archives*, 3(1), 1957–1966.
- Al-Mughrabi, S. S. (2025, September 17). *Israel says 'Gaza is burning' as it launches ground assault*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/world/middle->

- east/israel-says-gaza-is-burning-it-launches-ground-assault-2025-09-16/
- Aras, B. (2017). Turkey and the Palestinian Question: Diplomacy, Humanitarian Aid and Advocacy. *Insight Turkey*, 19(3), 45–62.
- Aziz, A. A., & Hidayatullah, N. L. (2026). The Role of the Organization of Islamic Cooperation Multilateral Diplomacy in Realizing the 2023 Riyadh Summit Mandate for Gaza. *Global Focus*, 6(1), 74–94.
- Berger, M. (2010). *Religion and Islam in Contemporary International Relations*. Netherlands: Netherlands Institute of IR Clingendael.
- Borger, J. (2025, September 16). *Israel launches ground offensive deep inside Gaza City*. Diambil kembali dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2025/sep/16/israel-launches-ground-offensive-deep-inside-gaza-city>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Donmez, B. B. (2025, Februari 27). *Kepala HAM PBB ingatkan pelanggaran Israel yang 'belum pernah terjadi sebelumnya' di Palestina*. Diambil kembali dari AA.com: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/kepala-ham-pbb-ingatkan-pelanggaran-israel-yang-belum-pernah-terjadi-sebelumnya-di-palestina-/3495595>
- El-Nawawy, M., & Iskandar, A. (2002). *Al-Jazeera: The Story of the Network that is Rattling Governments and Redefining Modern Journalism*. Boulder: Westview Press.
- Esposito, J. L. (2001). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (2009). *The Future of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Fathur Rochman, A. E. (2025, Juli 03). *Indonesia, Saudi Arabia urge global response to Gaza crisis*. Diambil kembali dari AntaraNews: <https://en.antaranews.com/news/363677/indonesia-saudi-arabia-urge-global-response-to-gaza-crisis>
- Gerges, F. A. (2013). *The New Middle East: Protest and Revolution in the Arab World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hashmi, S. H. (2009). *Islamic Ethics and International Relations*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Jabr, D. S. (2024, Juli 16). *A World Without Borders: Revolutionary love and solidarity for Palestine*. Diambil kembali dari Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20240716-a-world-without-borders-revolutionary-love-and-solidarity-for-palestine/>
- Junaidi. (2024, Oktober 06). *MUI Keluarkan 9 Poin Pernyataan Sikap atas Palestina*. Diambil kembali dari MUI Digital: <https://mui.or.id/baca/berita/mui-keluarkan-9-poin-pernyataan-sikap-atas-palestina>
- Kayaoglu, T. (2015). The Organization of Islamic Cooperation: Political, Economic and Social Dimensions. *Journal of International Organization Studies*, 6(1), 45–62.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Kemlu. (2024). *Statement on Palestine at the UN General Assembly*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Khader, B. (2013). *The European Union and the Arab World: From the Rome Treaty to the Arab Spring*. Brussels: PIE Peter Lang.
- Lawal, S. (2025, Januari 03). *Al Jazeera in Palestine: A timeline of coverage against all odds*. Diambil kembali dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/3/a-history-of-al-jazeera-in-palestine>
- Lynch, M. (2006). *Voices of the New Arab Public: Iraq, Al-Jazeera, and Middle East Politics Today*. New York: Columbia University Press.
- Magdy, J. F. (2025, September 18). *Israeli troops press forward into Gaza City as more Palestinians flee and death toll passes 65,000*. Diambil kembali dari APNews: <http://apnews.com/article/israel-hamas-wars-09-17-2025-902e4a41eb3c5802fd18c598083d247a>
- Mamedov, I., & Jackson, L. B. (2025). Instrumentalising Islam: The religious soft power strategies of China, Russia, and the US. *Review of International Studies*, 1–19.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.
- Organization of Islamic Cooperation (OIC). (2021). *Extraordinary Islamic Summit Declaration on Palestine*. Jeddah: Organization of Islamic Cooperation (OIC).
- Reuters. (2025, September 17). *Israel's closure of crossing to Gaza's famine-struck north prompts aid group warning*. Diambil kembali dari Reuters:
<https://www.reuters.com/world/middle-east/israels-closure-crossing-gazas-famine-struck-north-prompts-aid-group-warning-2025-09-17/>
- Reuters. (2025, September). *Saudi Arabia condemns Israeli ground operation in Gaza City 'in strongest terms'*. Diambil kembali dari Reuters:
<https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-condemns-israeli-ground-operation-gaza-city-in-strongest-terms-2025-09-17/>
- Rinaldi, R. (2025, Agustus 14). *Indonesia sends humanitarian aid to Palestine amid Independence anniversary*. Diambil kembali dari Indonesia Business Post:
<https://indonesiabusinesspost.com/4997/geopolitics/indonesia-sends-humanitarian-aid-to-palestine-amid-independence-anniversary>
- Said, E. (1997). *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World*. New York: Vintage.
- Seib, P. (2008). *The Al Jazeera Effect: How the New Global Media Are Reshaping World Politics*. Washington, DC: Potomac Books.
- Solikhati, S., & Fitri, F. (2026). Constructing Islamic communication research through a dialogical-dialectical approach: Evidence from Indonesia. *Islamic Communication Journal*, 11(1), 1–28.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Design* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Zamzami, F. (2023, November). *RI Foreign Minister: OIC Urge UNSC to Issue Firm Resolution on Gaza*. Diambil kembali dari Republika:
<https://en.republika.co.id/berita/s4ey3q393/ri-foreign-minister-oic-urge-unsco-to-issue-firm-resolution-on-gaza>